

KONTRIBUSI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

CONTRIBUTION OF DEVELOPMENT TOURISM IN INCREASING LOCAL REVENUE GUNUNGGKIDUL REGENCY

Oleh: Dini Wahyuning Agustina, Sugi Rahayu, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Yogyakarta, diniwahyuagustina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Desain penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Subbagian Perbendaharaan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pokdarwis di berbagai obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menjelaskan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah sudah baik namun masih belum stabil. Maka dari itu, harus dilakukan pengembangan pariwisata dengan menggunakan strategi yang tepat. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan menggunakan Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata dari Gamal Suwanto yang terdiri dari promosi pariwisata, aksesibilitas, kawasan pariwisata, wisata bahari, produk wisata, SDM, dan Kampanye Nasional Sadar Wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata terdapat kendala-kendala yang salah satunya adalah faktor dana. Sehingga hal tersebut berdampak pada kontribusi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul masih belum stabil.

Kata kunci: kontribusi, pengembangan pariwisata, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

This research aims to determine the contribution of tourism development in increasing Regional Original Income in Gunungkidul Regency as well as supporting factors and inhibiting factors in its implementation. The research design used descriptive methods with a qualitative approach. The research subjects were the Tourism Office of Gunungkidul Regency, the Regional Financial and Asset Agency of Gunungkidul Regency, Baron Beach, Kukup Beach, and Sepanjang Beach. This research is explain about the contribution of tourism in regional original income is not stable. So, it is have to do tourism development with the true strategy. The results of this study tourism development in Gunungkidul Regency was carried out using the Tourism Development Policy Sapta Suwanto which consisted of tourism promotion, accessibility, tourism areas, marine tourism, tourism products, human resources, and Tourism Awareness National Campaign. In implementing tourism development there constraints, one of which is funding. So, this has an impact on the contribution of tourism development in increasing Regional Original Revenue in Gunungkidul Regency is still not stable.

Keywords: contribution, development of tourism, increasing local revenue

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi dari suatu daerah guna meningkatkan laju pertumbuhan antar daerah yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tentu diperlukan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendanaan bersumber dari pendapatan asli daerah yang diperoleh baik dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ialah dengan menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dengan sebaik-baiknya agar potensi tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perkembangan masing-masing daerah lebih merata.

Ada beberapa sektor yang dapat dikembangkan secara optimal oleh daerah untuk mendapatkan penghasilan sebagai pendapatan daerah, diantaranya adalah: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perkebunan, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini, peneliti lebih tertarik pada sektor pariwisata dimana sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah bidang retribusi daerah, karena Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi pariwisata yang besar dan menarik untuk dikembangkan.

Pariwisata merupakan kegiatan dinamis yang dapat menghidupkan berbagai bidang usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan

menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata dapat memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata, termasuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata saat ini belum terarah dengan baik. Sehingga perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan strategi-strategi yang lebih baik.

Dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, kegiatan kepariwisataan harus didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya seperti promosi wisata, peningkatan fasilitas atau sarana prasarana yang ditawarkan, akses transportasi, serta *home stay* atau tempat penginapan. Langkah lain yang dilakukan yaitu promosi dengan media cetak, elektronik, maupun multimedia agar masyarakat juga mengetahui keberadaan obyek-obyek tersebut dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya.

Berikut ini kami paparkan terkait tabel jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah (Rp)	Persentase	
		Proporsi	Kenaikan
2011	2.309.007.231	2,2 %	25,1 %
2012	8.478.767.503	5,5 %	267,2 %
2013	8.168.857.392	4,3 %	-3,7 %
2014	17.415.255.577	7,3 %	113,2 %
2015	24.107.812.555	9,0 %	38,4 %
2016	28.375.385.56	8,0 %	17,7%

Sumber: Buku Statistik Kepariwisata 2016 Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini masih naik turun dan sedikit jika dilihat dari banyaknya obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata, dimana tujuan dari pengembangan kepariwisataan menurut Instruksi Presiden Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional, adalah meningkatkan pendapatan devisa

pada khususnya dan pendapatan negara pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya, memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia, serta meningkatkan persahabatan nasional dan internasional.

Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional (Sinclair, 1998 dalam Sugi Rahayu, dkk 2015: 14).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul serta faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengevaluasi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan teori dari Gamal Suwanto yaitu Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata yang mencakup promosi, aksesibilitas, kawasan

pariwisata, wisata bahari, produk wisata, sumber daya manusia, dan kampanye nasional sadar wisata dengan alasan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PAD dapat dilakukan melalui pengembangan sesuai dengan teori dari Gamal Suwanto.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Yuningsih Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro tahun 2005 berjudul *“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat”* dan penelitian yang dilakukan oleh Mahadika Tegar Deritasari, dkk Universitas Diponegoro 2004 berjudul *“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara”*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018 di Kabupaten Gunungkidul.

Subjek Penelitian

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul. Kepala Subbagian Perbendaharaan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ketua pokdarwis Pantai Baron. Ketua pokdarwis Pantai Kukup. Ketua pokdarwis Pantai Sepanjang.

Data dan Sumber Data

Data Primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada subjek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul 2013-2016 dan Buku Statistik Kepariwisata DIY 2013-2016.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung untuk melihat bagaimana aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, pokdarwis obyek wisata Kabupaten Gunungkidul, serta para pelaku pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak terkait yang telah ditentukan

sebelumnya oleh peneliti, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa laporan tahunan dari Buku Statistik Kepariwisata DIY tahun 2013-2016, Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2016, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pariwisata, dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2011:245), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adanya otonomi daerah seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan tanggung jawab baru kepada daerah dapat mandiri dalam semua bidang dan tidak bergantung pada pemerintah pusat termasuk dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Banyaknya kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul ini memiliki dampak yang positif bagi Kabupaten Gunungkidul, karena adanya kekayaan daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul terutama dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah bidang retribusi daerah. Akan tetapi, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul belum maksimal dan masih *fluktuatif*.

Hal ini dibuktikan dengan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul dari Sektor Pariwisata Tahun 2013-2016

THN	ANGGARAN TAHUN SEBELUM (RP)	REALISASI PENERIMAAN (RP)	LEBIH/KURANG ANGGARAN (RP)
2013	5.096.296.000	6.098.456.600	1.002.160.600
2014	12.161.070.000	14.989.421.527	2.828.351.527
2015	17.047.365.500	20.436.975.531	3.389.610.031
2016	25.404.556.106	24.020.468.803	(1.384.087.30)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016, diolah.

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 sebesar 5,44%. Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata secara optimal, dengan melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah daerah, swasta, dan pelaku pariwisata agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bidang retribusi daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah tersebut digunakan sebagai pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan PAD.

Kontribusi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul

Pariwisata merupakan salah satu potensi yang sangat menjanjikan, karena pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di bidang retribusi daerah. Akan tetapi, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah masih belum stabil. Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten

Gunungkidul dengan menggunakan strategi-strategi yang baik.

Menurut Gamal Suwanto (1997: 56), pengembangan pariwisata sering dikaitkan dengan adanya Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut

1. Promosi Pariwisata

Promosi pariwisata merupakan salah satu hal yang penting dalam pariwisata. Promosi pariwisata sering disebut sebagai pemasaran.

Berikut ini adalah tabel peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 4. Peningkatan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2016.

TAHUN	WISATAWAN
2013	1.063.109
2014	2.501.154
2015	2.642.759
2016	3.479.890

Sumber: Buku Statistik Kepariwisata 2013-2016 Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah wisatawan di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan promosi pariwisata yang dilakukan sudah efektif. Peningkatan jumlah wisatawan ini berdampak pada peningkatan kontribusi

pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Promosi pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul ini dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, promosi pariwisata dilakukan melalui media sosial yang terdiri instagram, facebook, dan website.

Kedua, promosi pariwisata dilakukan melalui *leaflet* dan *booklet* yang diberikan kepada tamu atau wisatawan yang datang ke Kabupaten Gunungkidul serta diberikan kepada khalayak umum ketika melakukan kunjungan ke suatu daerah. Ketiga, promosi pariwisata dilakukan dengan mengadakan pameran dengan menampilkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Pameran pariwisata yang telah terlaksana yaitu diadakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Pulau Batam.

Hal ini relevan dengan penelitian dari Nining Yuningsih (2005) bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Pangandaran adalah dengan melaksanakan promosi pariwisata melalui media massa dan pameran

wisata. Keempat, *Travel Dialog* yang melibatkan komunitas pariwisata, kelompok sadar pariwisata, dan pelaku pariwisata lainnya. *Travel dialog* ini dilakukan dengan diskusi dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pariwisata mulai dari produk wisata, lokasi pariwisata, potensinya, pemanduan, dan lainnya sebagainya.

Pemerintah Daerah berencana untuk menjadikan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul menjadi pariwisata yang *go international* dengan melakukan promosi ke luar negeri. Akan tetapi, keterbatasan dana menjadi faktor penghambatnya. Walau demikian, promosi pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan sudah baik.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas pariwisata berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berkaitan dengan ketertarikan wisatawan yang berkunjung ke wisata di Kabupaten Gunungkidul. Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan aksesibilitas pariwisata dengan baik.

Aksesibilitas pariwisata merupakan salah satu aspek penting

dalam pariwisata karena menyangkut pengembangan lintas sektoral. Aksesibilitas dalam hal ini yaitu menyangkut akses jalan menuju obyek wisata, papan petunjuk arah, rambu-rambu lalu lintas, dan juga transportasi. Secara keseluruhan, aksesibilitas pariwisata terkait dengan jalan menuju obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul ini sudah bagus. Akan tetapi, masih ada beberapa jalan menuju obyek wisata baru di Kabupaten Gunungkidul yang masih memerlukan penanganan dari dinas terkait.

Selain jalan, aksesibilitas pariwisata juga menyangkut papan petunjuk arah dan rambu-rambu lalu lintas. Papan petunjuk arah ini dapat memberikan informasi kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul. Papan petunjuk arah merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Sebagai informasi, papan petunjuk arah yang berwarna hijau merupakan pengadaan dari Dinas Perhubungan, dan untuk papan petunjuk arah yang berwarna coklat merupakan pengadaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk rambu-rambu lalu lintas

merupakan tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul. Kemudian terkait dengan penerangan jalan, merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul memang bertanggung jawab terhadap pengadaan papan petunjuk arah dan penerangan jalan. Akan tetapi, kelompok sadar pariwisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul juga berinisiatif untuk pengadaan papan petunjuk arah menuju obyek wisata secara lebih rinci. Hal ini dikarenakan papan petunjuk arah dari dinas belum dapat memberikat informasi lebih rinci untuk menuju ke obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul. Sama halnya dengan penelitian Nining Yuningsih (2005) yang relevan dengan penelitian ini, bahwa peningkatan aksesibilitas merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Pangandaran di mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

3. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan kawasan pariwisata berkaitan dengan peningkatan daya tarik wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul. Menurut Gamal Suwanto, kawasan pariwisata mencakup tiga hal yaitu meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan pariwisata, memperbesar dampak positif pembangunan, dan mempermudah pengendalian dampak lingkungan. Dalam pengembangan kawasan pariwisata, masyarakat khususnya kelompok sadar pariwisata memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki. Selain masyarakat, pihak swasta juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Pihak swasta seperti Bank Swasta berperan dalam pengadaan modal bagi pengelola pariwisata untuk

melaksanakan pengembangan kawasan pariwisata.

Kerja sama antara berbagai pihak dalam pembangunan kawasan pariwisata dapat menimbulkan berbagai dampak positif. Adanya peran serta dari BDG dengan membangun *gazebo-gazebo* di kawasan pariwisata dapat memberikan nilai tambah atau daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, adanya bangunan tugu atau gapuro atas kerja sama dengan BPD juga menambah daya tarik Pantai Ngobaran dan Pantai Nguyahan. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) dapat memberikan berbagai dampak positif bagi berbagai pihak, salah satunya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengendalian dampak lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, terutama untuk masalah kebersihan kawasan pariwisata. Walaupun Dinas Lingkungan Hidup menyediakan petugas kebersihan di beberapa obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama di kawasan pariwisata.

4. Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan salah satu jenis produk wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Wisata bahari sering dikaitkan dengan wisata air. Sebagian besar obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul ini memang merupakan wisata air. Mulai dari sungai, danau alami, danau buatan, air terjun, sampai dengan laut. Baik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul maupun pokdarwis selalu berupaya untuk mengelola kawasan wisata bahari ini dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan himbauan melalui pokdarwis-pokdarwis yang ada di Kabupaten Gunungkidul untuk menjaga dengan baik potensi dan kekayaan yang ada.

5. Produk Wisata

Produk wisata merupakan salah satu komponen penting dalam pariwisata. Produk wisata dalam hal ini bukan hanya terkait dengan obyek wisata, akan tetapi termasuk usaha pariwisata dan sarana pendukung lainnya seperti hotel, rumah makan, oleh-oleh, cinderamata, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk

bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dikarenakan produk wisata merupakan salah satu daya tarik dalam pariwisata. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata di Kabupaten Gunungkidul ini dilakukan melalui sosialisasi dan pengarahan, pelatihan, dan *study banding* ke pariwisata lain. Akan tetapi, karena keterbatasan dana yang dimiliki, peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam rangka pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam penelitian Nining Yuningsih (2005), daya tarik wisata merupakan produk wisata utama yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis. Hal ini juga relevan dengan penelitian dari Mahadika Tegar, dkk (2004) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara memberikan kemudahan birokrasi untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya sehingga pelaksanaan pengembangan

produk wisata seperti hotel dan restoran dapat berjalan dengan baik.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dalam pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata, karena manusia adalah pelaku utama dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa cara yaitu sosialisasi, pelatihan, dan diklat mengenai pengelolaan pariwisata yang baik dengan menjalin kerja sama dengan pihak terkait. Kelompok sadar pariwisata juga telah mengupayakan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelaksanaan perayaan hari-hari besar nasional maupun pelestarian budaya seperti upacara adat istiadat yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengibaran benderan merah putih di laut Pantai Baron dalam upacara peringatan HUT RI yang melibatkan pokdarwis, pedagang, TIM SAR, dan masyarakat umum serta pelaksanaan

upacara adat sedekah laut yang diadakan setiap tanggal satu bulan suro. Selain itu, pemberdayaan SDM dilakukan dengan cara mengikuti lomba-lomba kepariwisataan.

7. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Kampanye nasional sadar wisata pada hakikatnya merupakan upaya memasyarakatkan Sapta Pesona Pariwisata yang turut menegakkan disiplin nasional dan jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan. Sapta Pesona Pariwisata merupakan tujuh keadaan atau kondisi yang harus diwujudkan dalam setiap jasa pelayanan yang diberikan kepada wisatawan yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Hal ini dilakukan dengan menanamkan kepada masyarakat untuk bagaimana dapat memberikan keamanan dalam wisata, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, menciptakan suasana yang sejuk dengan tidak merusak lingkungan, menciptakan keindahan pariwisata, memberikan pelayanan yang ramah tamah kepada wisatawan, dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan kesan atau kenangan yang indah bagi wisatawan yang berwisata ke Kabupaten Gunungkidul.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul

Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, tentu ada faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat di dalamnya.

Kemudahan aksesibilitas untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Hal ini relevan dengan penelitian dari Mahadika Tegar, dkk (2004) bahwa dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara harus meningkatkan kerja sama antar pelaku pariwisata. Adanya Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG) dimana anggotanya merupakan warga Kabupaten Gunungkidul yang merantau ke berbagai daerah juga termasuk salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul khususnya dalam pelaksanaan promosi pariwisata.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini juga termasuk dalam faktor pendorong yang

dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Terutama dengan adanya media sosial yang dapat memberikan kemudahan dalam pengembangan pariwisata terutama dalam hal promosi pariwisata. Ketika promosi pariwisata dapat terlaksana dengan baik, maka secara otomatis akan meningkatkan daya tarik wisata dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul, sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya retribusi pariwisata sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Adanya pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) juga merupakan faktor pendorong pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul, dimana pembangunan JJLS tersebut dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti pemerintah dan juga masyarakat sekitar.

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul ini adalah kendala dalam keuangan. Dalam

pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini, dana memang menjadi kendala utama. Keterbatasan dana atau biaya memang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Keterbatasan dana dapat berpengaruh pada kurang maksimalnya pelaksanaan promosi pariwisata. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya informasi yang dapat disampaikan kepada publik, sehingga akan berpengaruh pada kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul. Ketika jumlah wisatawan sedikit, maka jumlah retribusi daerah dari sektor pariwisata juga sedikit dan hal ini berpengaruh pada kurangnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Faktor penghambat lain ialah kurang maksimalnya pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan pariwisata. Kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia akan berpengaruh pada hal lain dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata ini. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik pemerintah maupun pokdarwis mengadakan pelatihan-pelatihan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Akan tetapi, keterbatasan dana yang ada menyebabkan

pemberdayaan sumber daya manusia tersebut menjadi kurang maksimal.

Keterbatasan dana memang bukan satu-satunya kendala dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, secara keseluruhan keterbatasan dana berpengaruh pada pelaksanaan pengembangan pariwisata kurang maksimal sehingga hasilnya kurang optimal. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kontribusi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Hal ini relevan dengan penelitian dari Nining Yuningsih (2005) bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan obyek wisata Pantai Pangandaran adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang, kurangnya kesadaran dari para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat, abrasi pesisir pantai, kurang tertibnya pedagang kaki lima, persaingan yang semakin ketat, krisis moneter, kultur masyarakat yang kurang mendukung, dan kurangnya kesadaran terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan.

SIMPULAN

Kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar -3,7%, peningkatan

pada tahun 2014 sebesar 113,2%, tahun 2015 sebesar 38,4%, dan padatahun 2016 sebesar 17,7%.Pelaksanaan pengembangan pariwisata tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu pihak swasta dan masyarakat.

Maka dari itu, dilakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata yaitu promosi pariwisata, aksesibilitas, kawasan pariwisata, wisata bahari, produk wisata, Sumber Daya Manusia, dan Kampanye Nasional Sadar Pariwisata. Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata tersebut sudah terlaksana dengan baik namun kontribusi dalam PAD belum stabil

Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata, tentu ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Adanya faktor pendukung yang dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata seperti terbentuknya Ikatan Keluarga Gunungkidul memberikan kemudahan dalam promosi pariwisata. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi yang juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Selain terdapat faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.

Secara keseluruhan, faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata adalah faktor dana.

SARAN

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah melalui pengelolaan potensi daerah menggunakan strategi-strategi yang tepat agar hasilnya lebih optimal.
2. Pengelolaan potensi daerah harus dilaksanakan dengan berbagai pihak seperti swasta dan pelaku pariwisata agar pelaksanaan lebih optimal dan hasilnya lebih maksimal.
3. Adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata hendaknya dijadikan sebagai peluang dan tantangan dalam pengembangan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Buku:

Burkart, A. J. dan Medlik, S. (1987). *Tourism, Past, Present, and Future*. London.

Kodhyat, H. (1983). *Pariwisata Indonesia 1982, Angin Segar dalam Kelesuan*. Jakarta: Harian Kompas.

Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda.

Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Pendit, I Nyoman, S. (1994). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahman, Herlina. (2003). *Paduan Brevet Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwantoro, Gamal. (1997). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Wahab, Salah. (1985). *Tourism Manajemen, Tourism International Press*. London.

Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Yani, Ahmad. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bahan Jurnal dan Skripsi:

Rahayu, Sugi, dkk. (2015). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY.

Yuningsih, Nining. 2005. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran*

- Kabupaten Ciamis Jawa Barat.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Deritasari, Mahadika Tegar, dkk. 2004. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Bahan Web:

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *Statistik Kepariwisataaan 2015.* Diakses melalui www.visitingjogja.com pada Selasa, 27 Juni 2015 pukul 11.00 WIB.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. (2013). *Ekonomi di Garis Penaku.* Diakses melalui <http://dispenda.sumutprov.go.id/v/index.php/artikel/31-kontribusi-pendapatan-asli-daerah-pad-dalam-mendorong-percepatan-pembangunan-daerah> pada Selasa, 27 Juni 2017 pukul 10.17 WIB.

Bahan Perundang-undangan:

Instruksi Presiden Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.